



Tren Korupsi 2010 Semester 1

Tim Penyusun
Tama Slangkun - Agus Sunaryanto - Lais
Abid - Febri Hendri

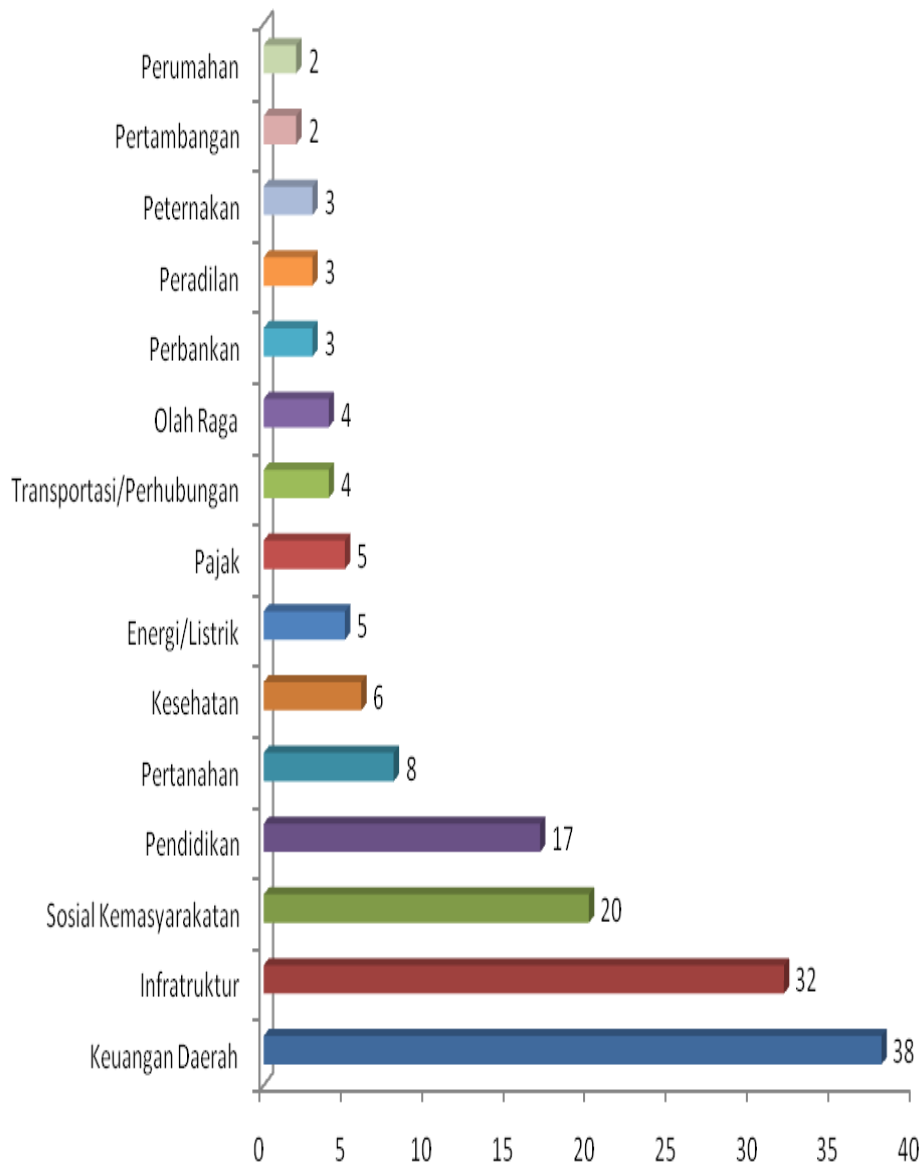
Trend Korupsi Semester II 2010

- Selama periode 1 Juli – 31 Desember 2010 ditemukan 272 kasus korupsi yang terjadi baik di level pusat maupun daerah.
- Aktor yang telah ditetapkan tersangka oleh aparat penegak hukum sebanyak 716 orang.
- Sedangkan potensi kerugian negara yang ditimbulkan akibat kasus korupsi tersebut sebesar Rp. 1.546.584.862.400 (Satu triliun lima ratus empat puluh enam miliar lima ratus delapan empat juta delapan ratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah).

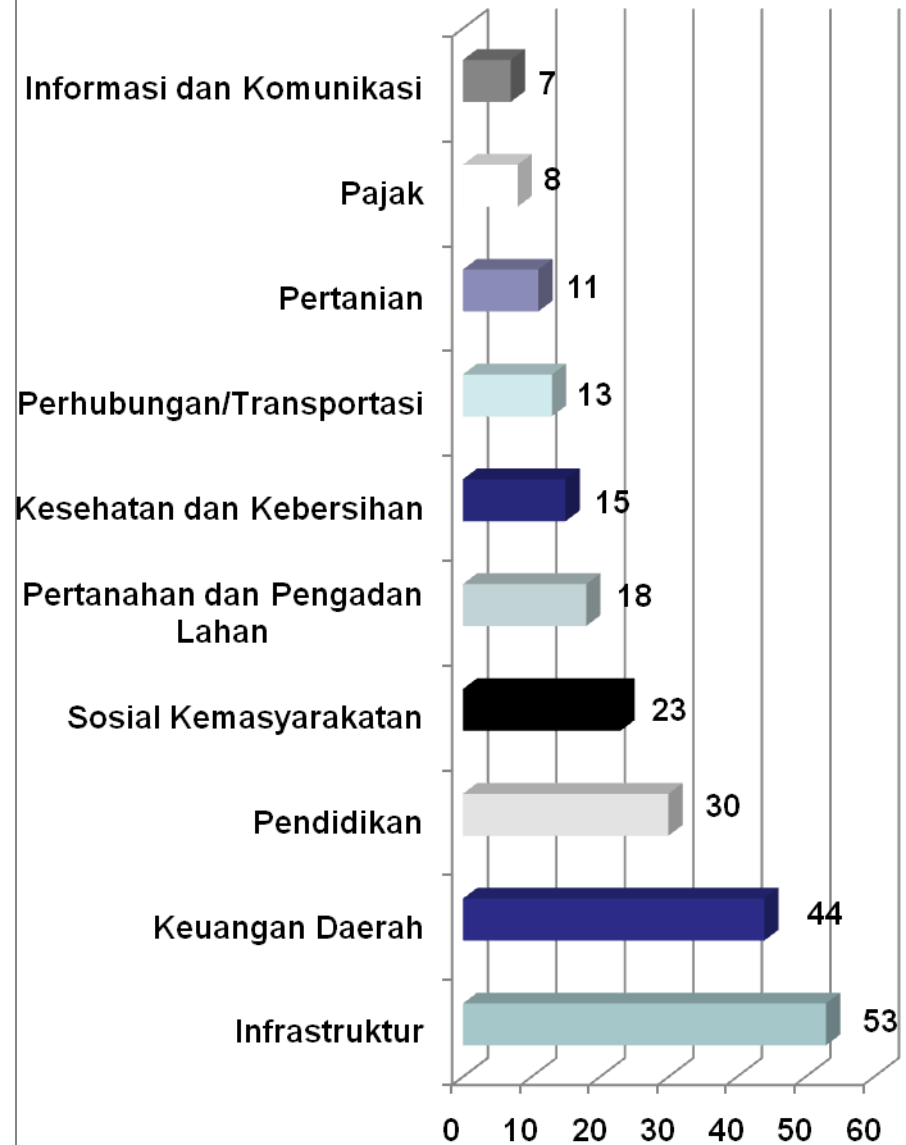
Perbandingan Penindakan Kasus Korupsi Sem I 2010 dengan Semester II 2010

	Sem I 2010	Sem II 2010
Jumlah kasus	176 kasus	272 kasus
Kerugian Negara	Rp 2,1 triliun	Rp 1,5 triliun
Jumlah Tersangka	441 tersangka	716 Tersangka

Sektor Korupsi Semester I dan II 2010



Hanya ditampilkan 15 sektor tertinggi



Cat : Hanya ditampilkan 10 sektor tertinggi

Temuan :

Pada semester II tahun 2010, infrastruktur menjadi sektor yang paling korup, meningkat menjadi 53 kasus dari 32 kasus di semester I. Begitu juga dengan korupsi di sektor pendidikan yang meningkat signifikan.

Namun demikian jika ditinjau dari sisi potensi kerugian negara, sektor Pertambangan, keuangan daerah dan energi menjadi yang paling besar menimbulkan potensi kerugian negara.

Beberapa kasus menonjol yang menimbulkan potensi kerugian negara paling besar selama semester II tahun 2010, yaitu :

- ▶ korupsi pengalihan dan penjualan serta penggunaan hasil penjualan saham milik Pemkab Kutai Timur pada PT Kaltim Prima Coal oleh PT Kutai Timur Energi
- ▶ Kasus korupsi APBD di Indragiri hulu sebesar 116 miliar
- ▶ Kasus korupsi penyalahgunaan dana APBD Kabupaten Langkat tahun anggaran 2003-2007 senilai Rp 102 miliar

Sektor Korupsi Berdasarkan Jumlah Kerugian Negara

5 sektor korupsi yang menyumbangkan potensi kerugian negara terbesar diduduki oleh sektor pertambangan dengan Rp. 576 miliar (1 kasus).

Sedangkan 4 sektor lainnya yaitu

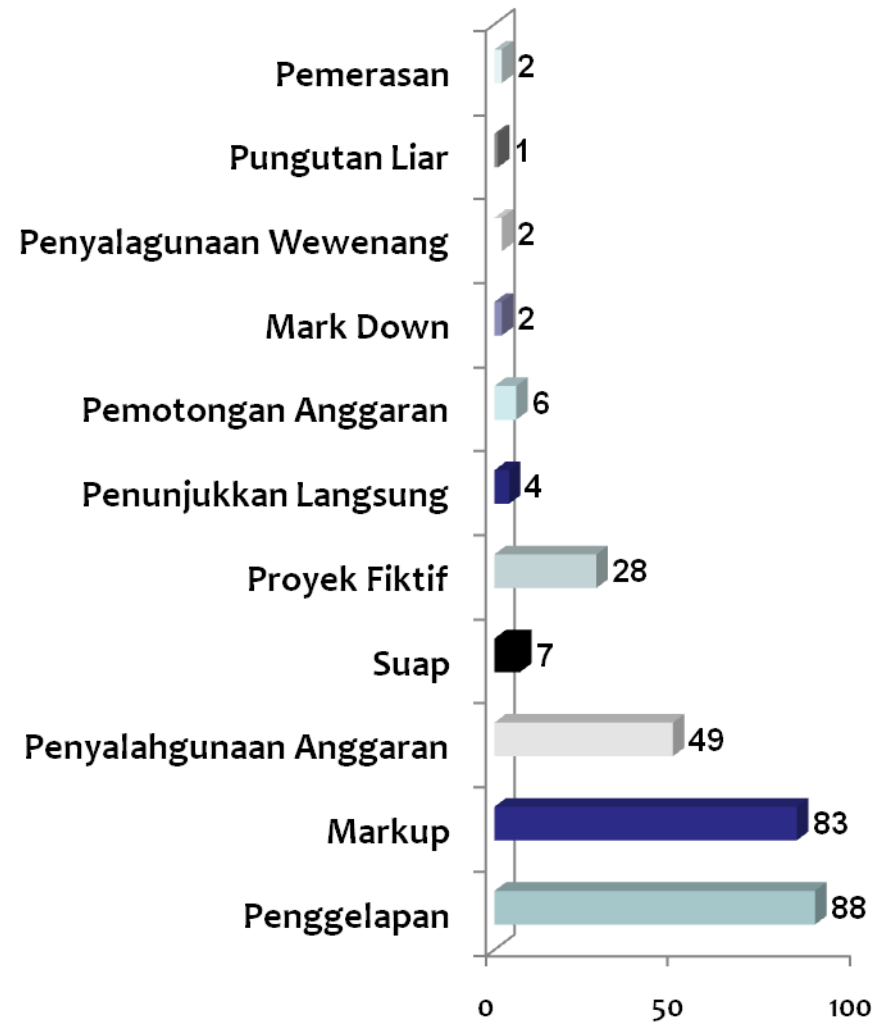
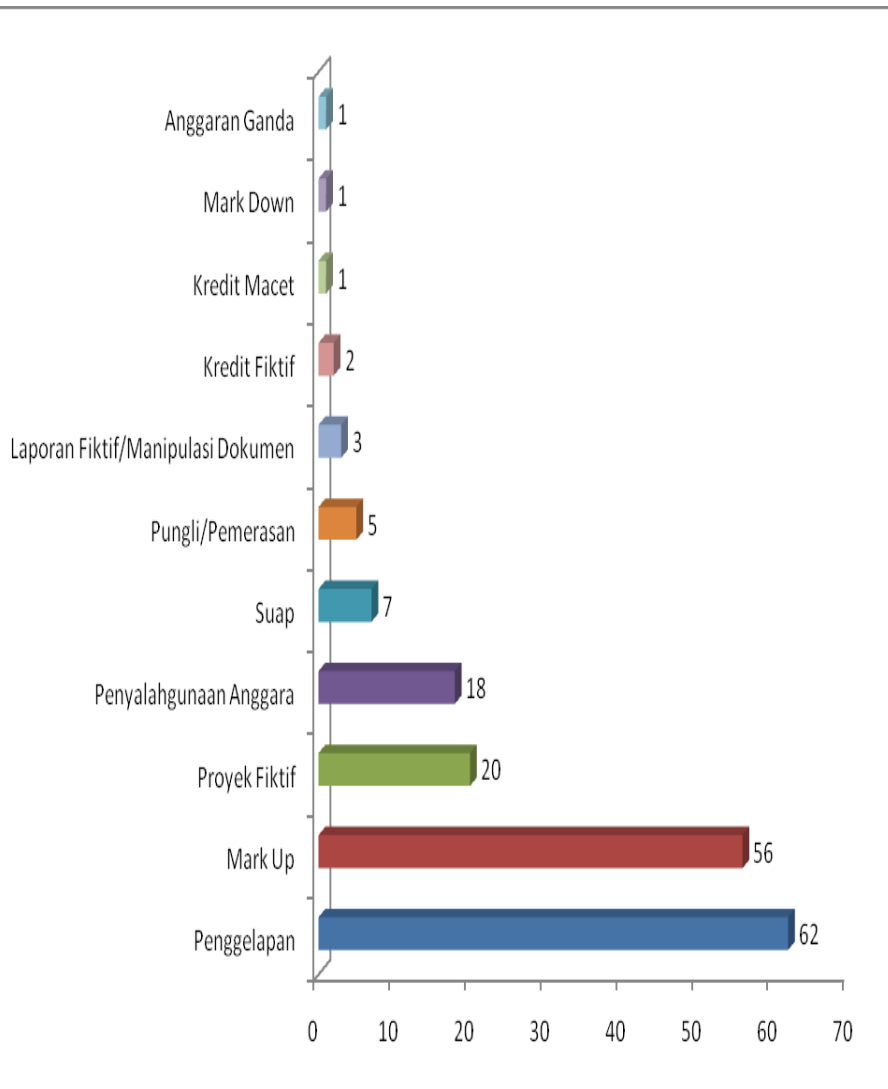
- Keuangan daerah : Rp 344,7 miliar (44 kasus),
- Energi Rp.240,3 miliar (4 kasus),
- Pertanahan/Lahan Rp.143 miliar (18 kasus),
- Pajak : 47,3 miliar (8 kasus)
- Infrastruktur : 40,9 miliar (53 kasus)

Temuan :

Sektor	Jumlah Kasus	Jumlah Kerugian Negara (Rp Miliar)
Pertambangan	1	576.0
Keuangan Daerah	44	344.7
Energi	4	240.3
Pertanahan dan Pengadaan Lahan	18	143.0
Pajak	8	47.3
Infrastruktur	53	40.9
Pendidikan	30	39.6

- Korupsi di sektor pertambangan, meski hanya terjadi satu kasus namun menjadi penyumbang potensi kerugian negara terbesar
- Selain pertambangan, sektor keuangan daerah, pertanahan, pajak juga sangat rawan menimbulkan kerugian negara yang besar.

Modus Korupsi Semester I dan II 2010



Temuan :

Modus korupsi yang sering terjadi selama semester II 2010 adalah penggelapan dengan 88 kasus. Itu berarti ada konsistensi dengan semester sebelumnya , dimana penggelapan menyumbang 62 kasus.

Modus lain yang dominan di semester II ini adalah modus mark up (83 kasus), penyalahgunaan anggaran (49 kasus), proyek fiktif (28 kasus) dan suap (7 kasus)

Temuan : Konsistensi modus

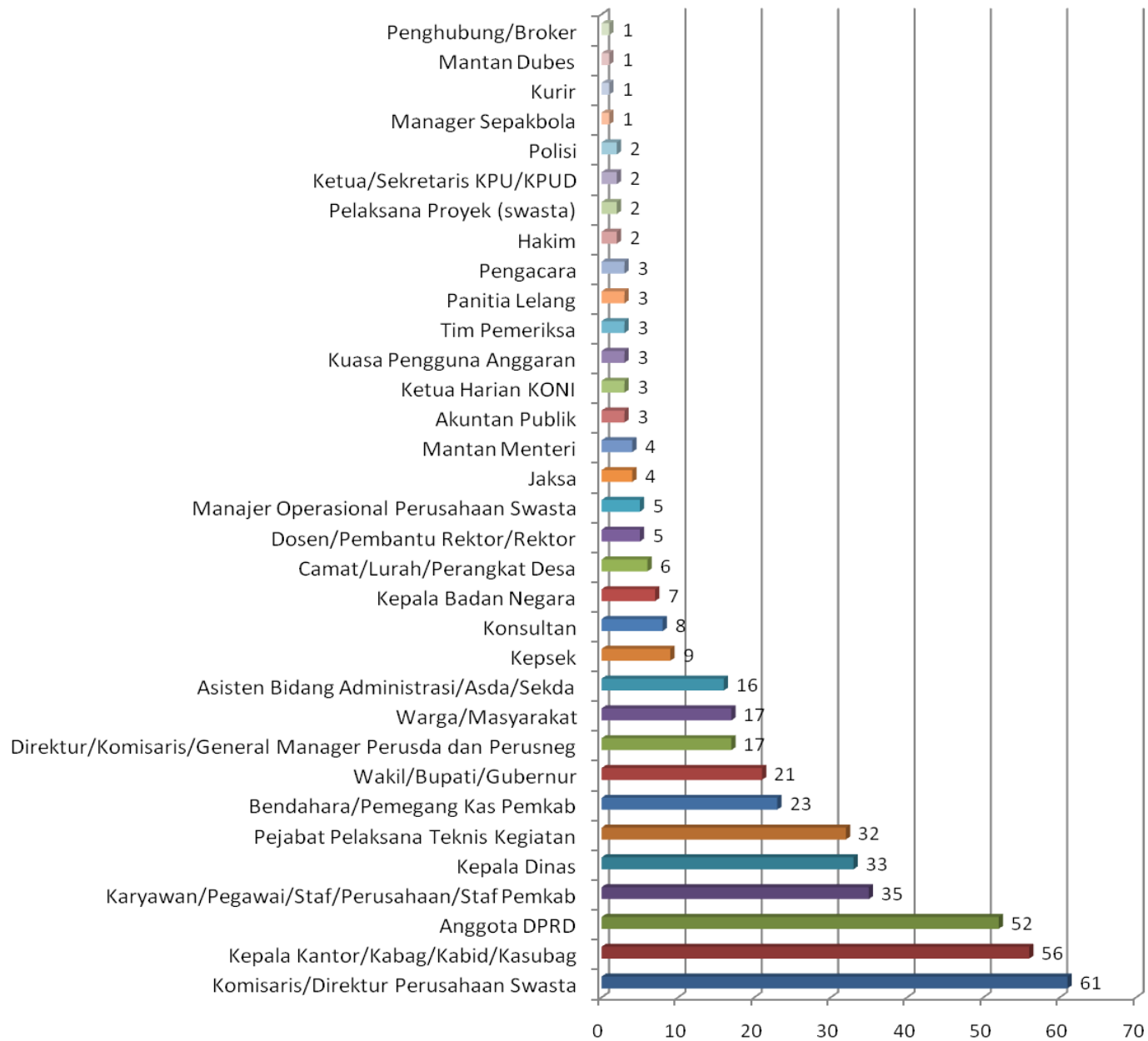
Terdapat konsistensi antara Semester I dan II Tahun 2010 dalam modus korupsi dimana penggelapan menjadi modus yang paling sering digunakan para tersangka meraup keuntungan.

Analisis :

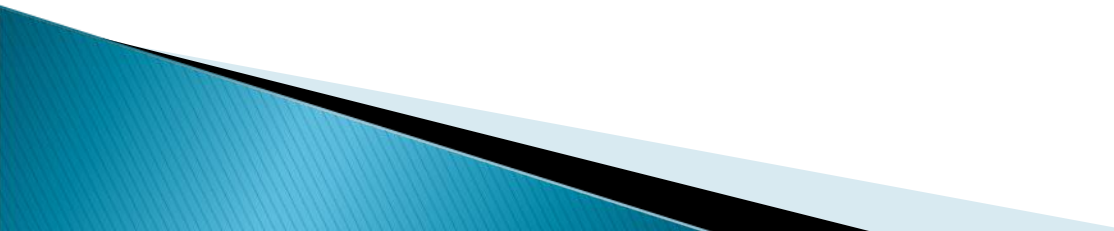
Kasus penggelapan banyak terjadi di sektor keuangan daerah, sosial kemasyarakatan dan pendidikan ini menunjukkan kelemahan dalam manajemen keuangan dan pengawasan internal pemerintah daerah.

Hal ini juga menjelaskan mengapa aktor dari latar belakang pegawai/pejabat pemda yang terjerat oleh aparat penegak hukum

Aktor Korupsi Semester I 2010



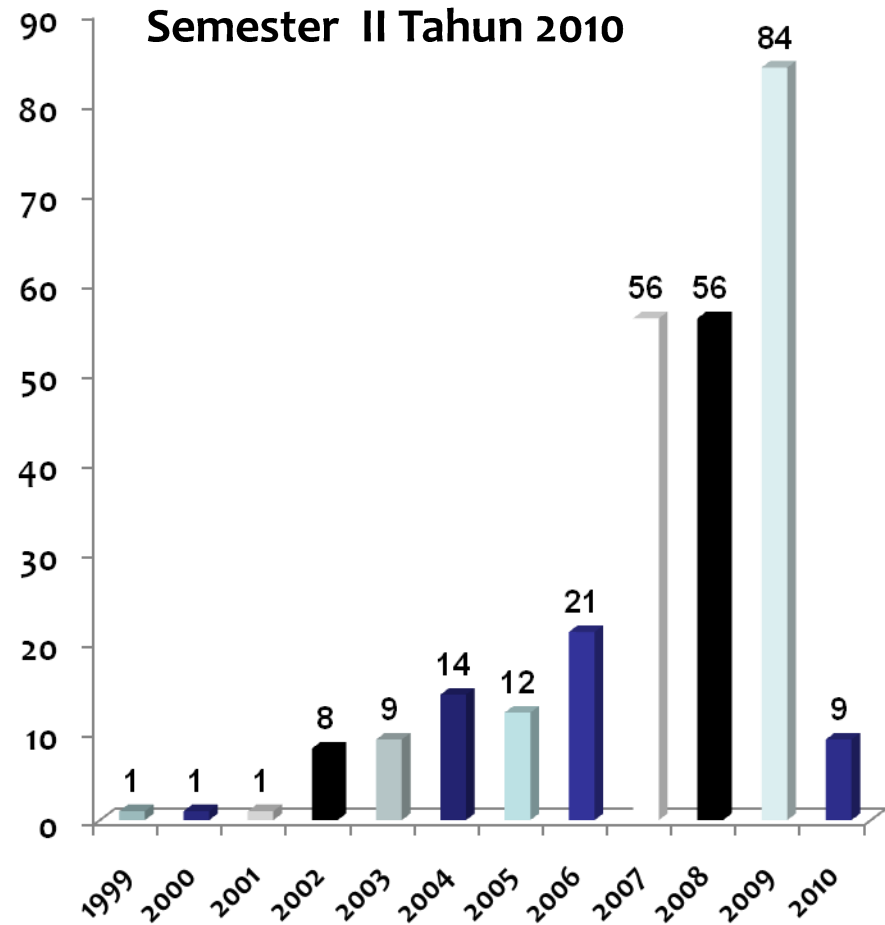
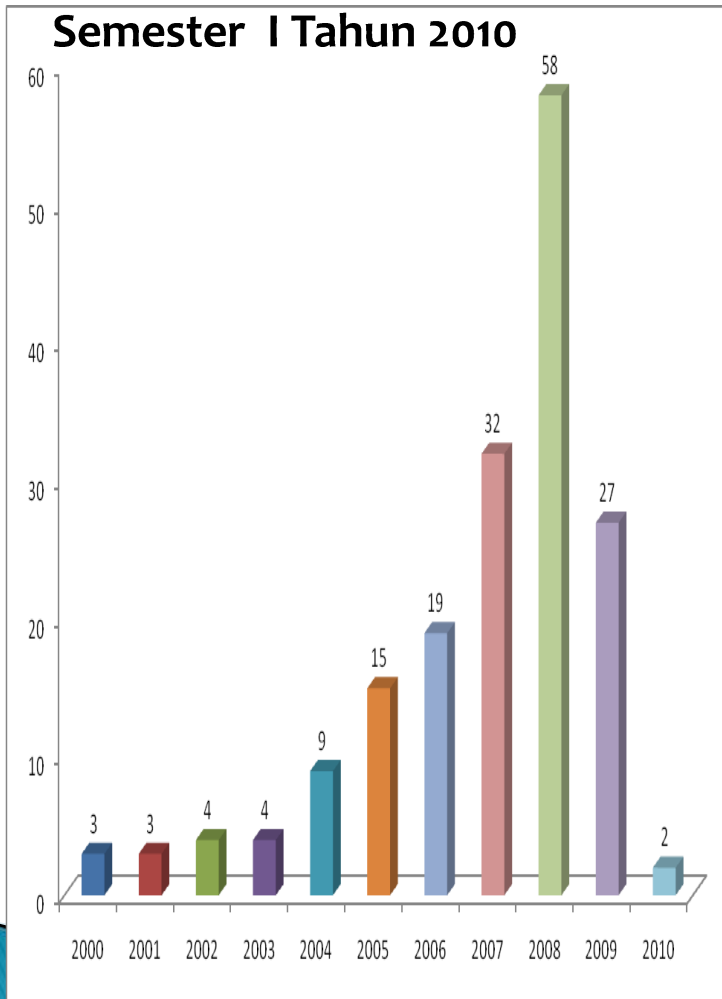
Temuan :

- ▶ Pada semester II tahun 2010, tersangka korupsi didominasi oleh aktor dari latar belakang pegawai atau staf pemda dengan jumlah 86 orang.
 - ▶ Tipologi kasus yang melibatkan pegawai/staf pemda lebih banyak terkait dengan kasus keuangan daerah.
 - ▶ 4 pelaku tertinggi lain diikuti oleh DPR/D (82 orang), pejabat pelaksana teknis kegiatan (72 orang), Kepala Dinas (70 orang).
- 

Temuan :

- ▶ Jika dibandingkan antara smt I 2010 dan smt II 2010, menunjukkan ada pergeseran aktor korupsi dari aktor yang dengan latar belakang swasta menjadi aktor dari sektor pegawai/staf pemda
- ▶ Jeratan terhadap aktor berlatar belakang pegawai/staf pemda menunjukkan bahwa aparat penegak hukum di daerah banyak menjerat aktor “kelas teri”. Ada kecenderungan aparat penegak hukum hanya mengejar kuantitas dibanding kualitas.
- ▶ Keterlibatan aktor dari DPR/D tetap harus diwaspadai karena keterlibatannya cenderung semakin meningkat dari 52 orang (smt 1 2010) menjadi 82 orang (Semester II 2010)

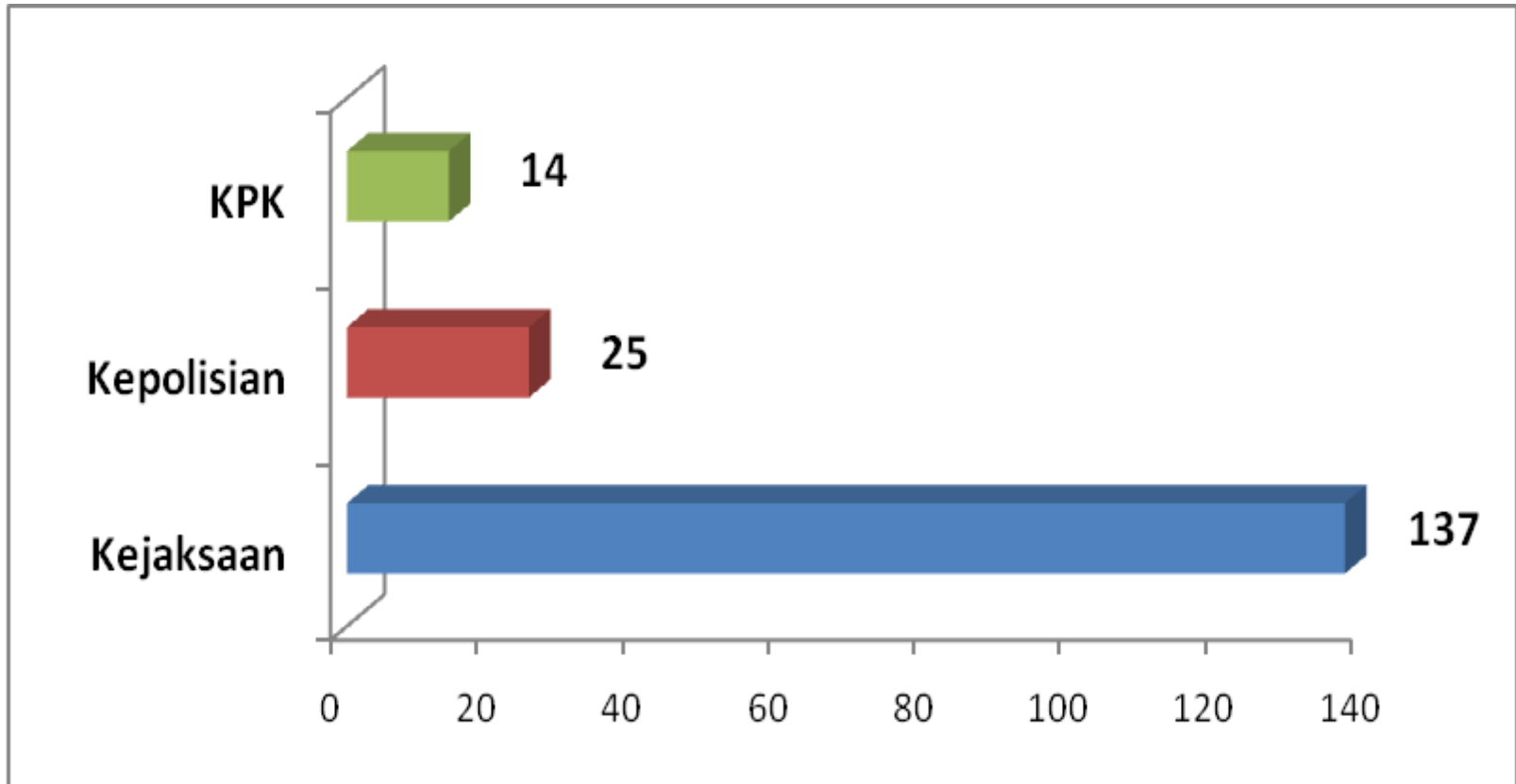
Kasus Korupsi Berdasarkan Tahun Terjadi



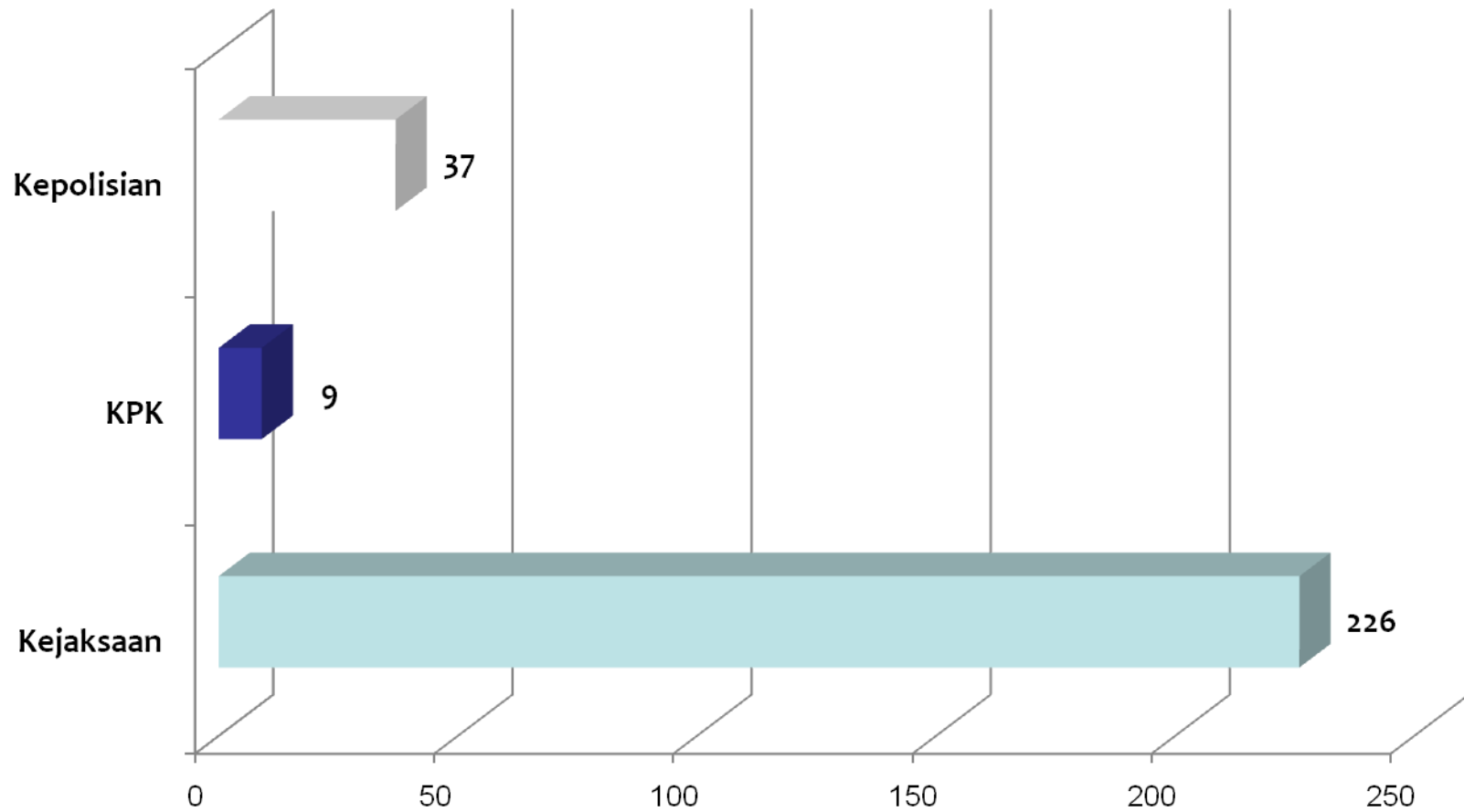
Temuan :

- ▶ Kasus yang paling banyak di sidik tahun 2010 adalah kasus yang terjadi tahun 2009 yaitu 84 kasus, tahun 2008 dan 2007 dengan 56 kasus, tahun 2006 dengan 21 kasus.
- ▶ Khusus untuk kasus yang terjadi pada semester II tahun 2010 hanya terdapat 9 kasus, Satu kasus ditangani oleh KPK yaitu terkait penyuapan auditor BPK di Bekasi Jawa Barat dan selebihnya ditangani oleh Kepolisian (5 kasus) dan Kejaksaan (3 kasus)
- ▶ Gambaran penegakan hukum kasus korupsi baik semester I dan II 2010 tidak jauh berbeda dimana aparat penegak hukum baik Kejaksaan, Kepolisian maupun KPK lebih dominan menangani kasus-kasus korupsi satu hingga dua tahun sebelumnya. Bisa dikatakan respon penegak hukum terbilang masih lambat menangani kasus korupsi.

Kasus yang ditangani institusi penegak hukum Semester I tahun 2010



Kasus yang ditangani institusi penegak hukum Semester II tahun 2010



Temuan :

- ▶ Selama semester II 2010 setidaknya tercatat 272 kasus korupsi yang statusnya sudah ditingkatkan ke penyidikan oleh aparat penegak hukum. Dari 272 kasus tersebut, jajaran kejaksaan yang paling dominan menangani kasus korupsi di berbagai daerah dengan 226 kasus, Kepolisian 37 kasus dan KPK 9 kasus.
- ▶ Sesuai gambaran tersebut terlihat bahwa penanganan kasus oleh kejaksaan dan kepolisian lebih baik secara kuantitas dibanding dengan KPK. Hal ini bisa dimaklumi karena dua institusi tersebut merupakan instansi vertikal yang terstruktur hingga tingkat kabupaten/kota sehingga idealnya tentu harus lebih dari segi kuantitatif.

Potensi Kerugian Negara Berdasarkan Kasus yang Ditangani Penegak Hukum Tahun 2010

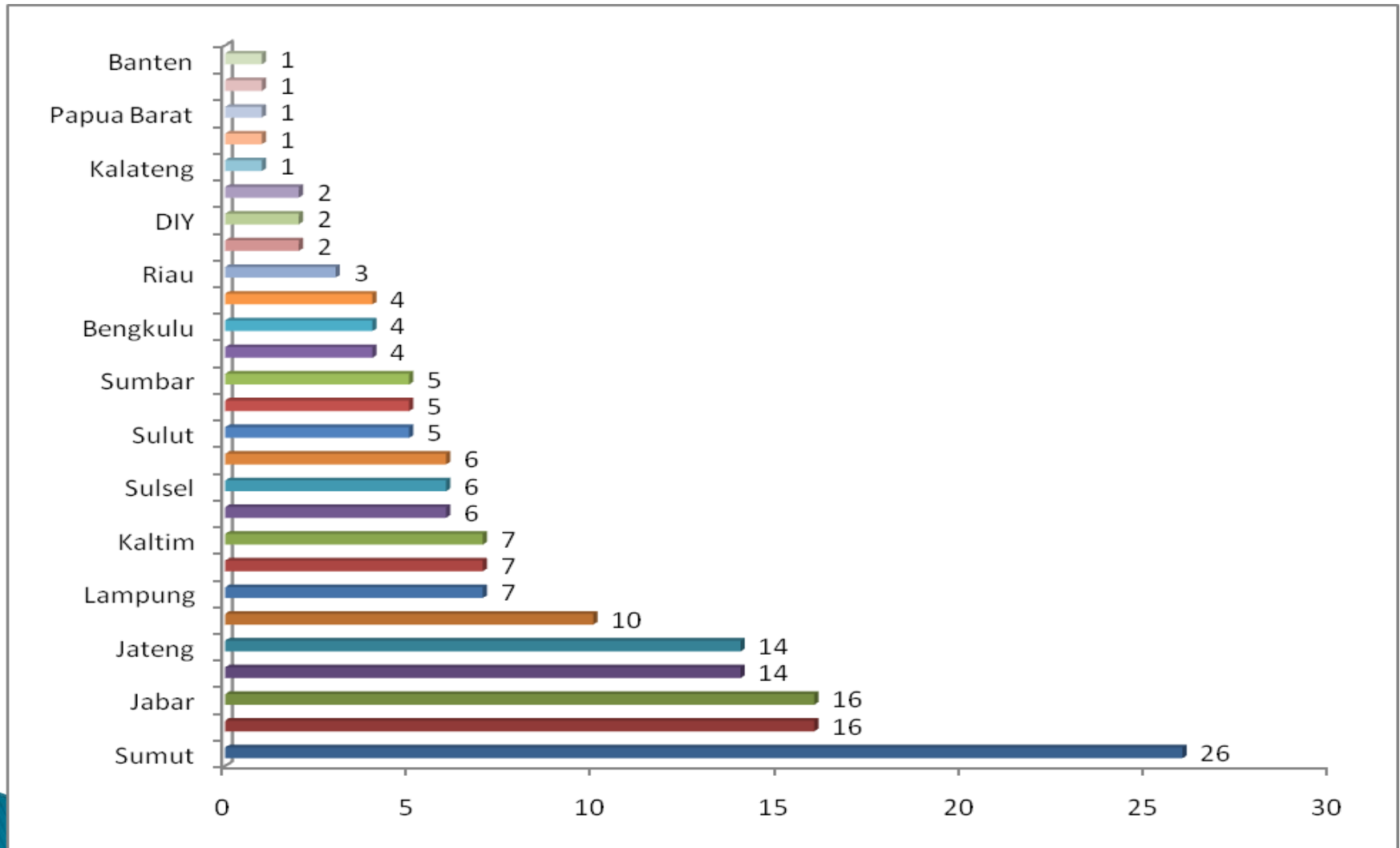
Semester I 2010

Penegak Hukum yang Menyidik	Jumlah Kasus	Kerugian Negara	
Kejaksaan	137	Rp	1,576,536,897,027
Kepolisian	25	Rp	327,513,452,023
KPK	14	Rp	198,860,000,000
Total	176	Rp	2,102,910,349,050

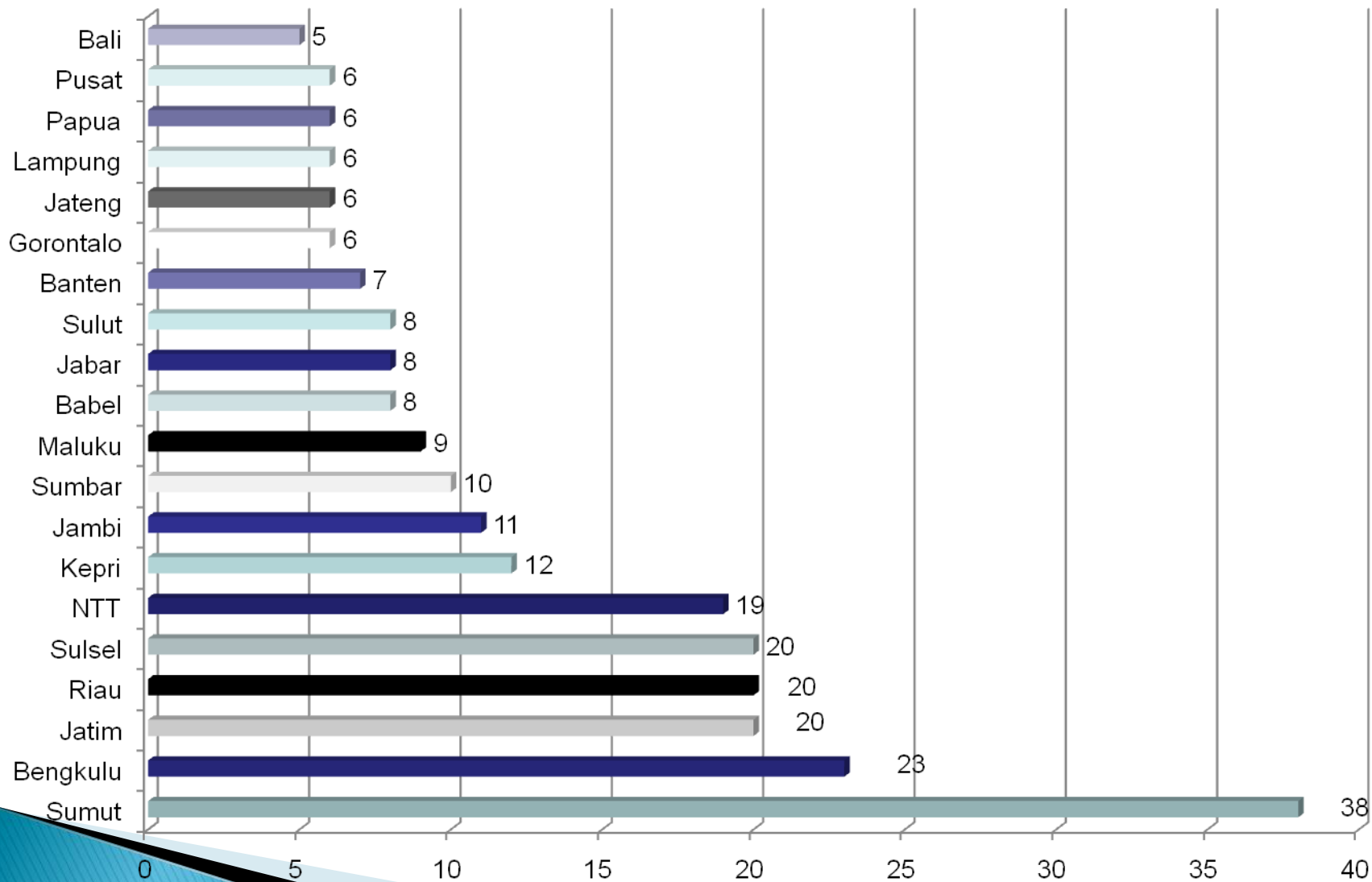
Semester II 2010

Penegak Hukum	Jumlah Kasus	Kerugian Negara (Rp miliar)
Kejaksaan	226	1,212.7
Kepolisian	37	262.9
KPK	9	71.0
Total	272	1,546.6

Wilayah Terjadinya Korupsi Semester I 2010



Wilayah Terjadinya Korupsi Semester II 2010



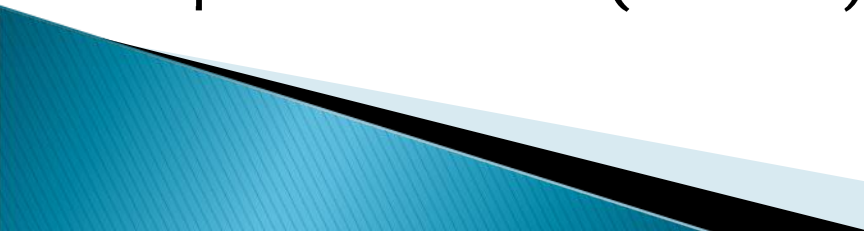
Temuan :

- Korupsi di semester awal 2010 ini terjadi di 27 Propinsi. Dari 27 propinsi tersebut, 5 propinsi yang paling tinggi kasus korupsinya yaitu Sumatera Utara (38 kasus), Bengkulu (23 kasus), Jawa Timur, Riau dan Sulsel (20 kasus).
- Sedangkan potensi kerugian negara yang paling besar ditimbulkan oleh kasus-kasus yang terjadi dalam wilayah Kalimantan Timur Rp. 601 miliar (2 kasus), diikuti pemerintah Pusat Rp. 200 miliar (6 kasus), Sumatera Utara Rp 179 miliar (38 kasus) dan Riau 128 miliar (20 kasus).
- Kemudian Bengkulu kuantitas kasus banyak kerugian negara minim

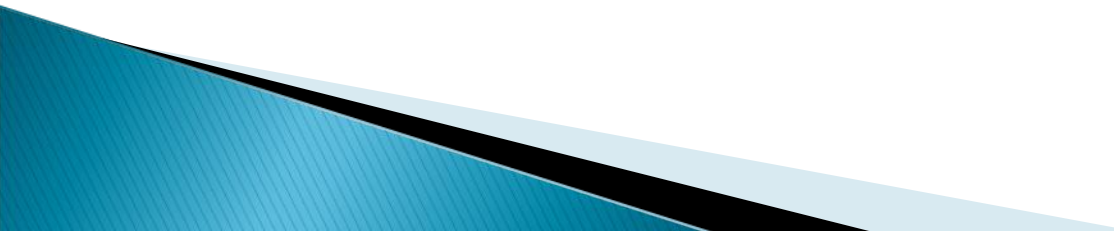
Kesimpulan

- ▶ Infrastruktur merupakan sektor yang paling dominan terjadi korupsi namun dari sisi potensi kerugian negara yang ditimbulkan pertambangan, keuangan daerah dan energi adalah sektor yang paling merugikan.
- ▶ Selama Tahun 2010, penggelapan adalah modus yang paling sering terjadi atau terjadi konsistensi modus antara semester I dan II 2010.
- ▶ Tingginya modus penggelapan tersebut terkait dengan penyimpangan dana yang langsung berhubungan dengan Keuangan daerah dan kepentingan masyarakat seperti dana-dana bantuan kemasyarakatan,

Rekomendasi

- ▶ Aparat penegak hukum harus lebih konsentrasi untuk mengungkap kasus yang melibatkan aktor dari kelas kakap di daerah khususnya politisi, kepala daerah dan pengusaha.
 - ▶ Reformasi birokrasi daerah dengan meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam merencanakan dan mengawasi APBD.
 - ▶ BPK/BPKP/Irjen/Bawasda tidak hanya menyerahkan temuan bersifat administratif tetapi juga temuan yang bersifat pidana
 - ▶ Pengawasan ketat menjelang peristiwa-peristiwa politik daerah (Pilkada)
- 

Periode Pemantauan

- Pemantauan dilakukan selama periode 1 Juli 2010 – 31 Desember 2010
 - Laporan ini disusun berdasarkan data yang bersumber dari media, termasuk didalamnya data kasus yang bersumber dari website kejaksaan (kejaksaan.go.id).
- 

Metode Pemantauan

- Kasus korupsi yang dipantau adalah seluruh kasus yang statusnya dalam tahap penyidikan dan aparat penegak (Kejaksaan, Kepolisian dan KPK) telah menetapkan tersangka yang diduga terlibat.
- Sumber data dari media masa cetak dan elektronik (yang memiliki versi web), dan media online yang ada di Indonesia (termasuk website kejaksaan.go.id)
- Pemantauan dilakukan dengan cara membagi pemantau berdasarkan wilayah-wilayah administratif, kemudian hasilnya dikompilasi dan diolah secara kuantitatif

Terimakasih
www.antikorupsi.org

